

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah)**

**Loli Efendi<sup>1</sup>, Darwanis<sup>2</sup>, Syukriy Abdullah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

<sup>2,3</sup>Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

E-mail: loli.kiswah@gmail.com

### ***Abstract***

*This study aims to examine the effect of the quality of regional apparatus, the utilization of information technology, and the supervision of regional finance on the quality of local financial reporting at the Regional Working Units in the Central Aceh Regency. The population of this study is all and agencies in the Central Aceh District. A total of 28 Regional Working Units, consisting of 3 officers (i.e., Head of the Office or the Budget User, Head of Accounting Department, and accounting staff) were selected as the respondents of the study. The data are gathered using the questionnaires and analysed using the Multiple Linear Regression Analysis. The results showed that the quality of the regional apparatus, the utilization of information technology, and the supervision of regional finance significantly affected the quality of local financial reporting at the Regional Working Units in the Central Aceh Regency. This findings implied that in order to improve the quality of local financial reporting, the policy makers should focus on ensuring the quality of regional apparatus, the utilization of information technology, and the supervision of regional financial management.*

**Keywords:** *Quality of Regional Apparatus, Utilization of Information Technology, Regional Financial Supervision, Quality of Local Financial Reporting*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh institusi/lembaga yang meliputi kantor, dinas dan badan pada Kabupaten Aceh Tengah. Sebanyak 28 SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) dan untuk masing-masing SKPK terdiri dari 3 orang yang terdiri dari kepala SKPK atau Pengguna Anggaran, kepala bagian akuntansi dan staf bagian akuntansi sebagai responden penelitian. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan kemudian dianalisis dengan menggunakan Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Temuan ini menyiratkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah, pembuat kebijakan harus fokus untuk memastikan kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

**Kata Kunci:** *Kualitas Aparatur Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah*

## **PENDAHULUAN**

Saat ini, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berupa laporan keuangan. Tujuan utama pelaporan keuangan di pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak.

Fenomena terkait kualitas pelaporan keuangan Kabupaten Aceh Tengah, masih terdapat banyak temuan dan penyimpangan yang berhasil diungkap oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berkaitan dengan SPI (Sistem Pengendalian Intern) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan daerah hingga saat ini juga masih mengalami kendala dalam proses penyusunannya. Permasalahan yang paling mendasar dalam penyusunan laporan keuangan adalah SDM (Sumber Daya Manusia) pada masing-masing SKPD, dalam hal ini adalah aparatur daerah. Kenyataannya, banyak pihak yang bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan keuangan bukanlah orang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Hal tersebut menjadi kendala bagi pihak aparatur daerah dalam menyampaikan laporan keuangan dikarenakan pegawai belum sepenuhnya siap dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga tidak memenuhi kaidah pelaporan keuangan normatif sesuai yang disyaratkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) (Eriva et al, 2013).

Kemudian dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai (Arfianti, 2011). Hal pertama yang mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti diketahui bahwa total volume APBN/D (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus

diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002).

Selain kualitas aparatur daerah dan pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah juga turut menentukan kualitas pelaporan keuangan daerah. Karena pada akhirnya, diperlukan suatu proses pengawasan keuangan daerah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Yosa, 2010). Namun yang terjadi saat ini adalah, kurangnya pengawasan yang dilakukan menyebabkan kelalaian dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu (Trisaputra, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh instansi (SKPK) Aceh Tengah khususnya dan Pemerintah Daerah umumnya agar dapat memproses, menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berusaha agar laporan keuangan yang dihasilkan seluruh SKPK maupun pemerintah daerah dapat memiliki kualitas pelaporan. Bagi akademisi, kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembandingan untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Pelaporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah (Indriasari dan Ertambang, 2007). Salamun (2007) menyatakan bahwa asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat

diterapkan, asumsi dasar tersebut meliputi asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas dan asumsi keterukuran dalam satuan uang. Pelaporan keuangan sektor publik juga disusun atas dasar prinsip-prinsip pelaporan. Prinsip pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berkaitan dengan entitas pelaporan, Halim (2007) menyebutkan bahwa pada ketentuan terdahulu terdapat dua pilihan bagi pemerintah daerah dalam menentukan entitas pelaporan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 96-100 menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah terdiri atas 2 (dua) tahapan. Tahap pertama yaitu penyusunan laporan keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

PP 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **Kualitas Aparatur Daerah**

Menurut Martoyo (2007), sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Agar terdapat manusia-manusia yang berkualitas atau manusia yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya manajemen sumber daya manusia (MSDM) (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Untuk menilai kualitas aparatur dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari tingkat tanggungjawabnya dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik (Setiawati dan Sari, 2014). PNSD yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas PNSD di bidang akuntansi

(keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Menurut Sedarmayanti (2004: 21), manusia seutuhnya yang berkualitas adalah manusia-manusia pembangunan yang memiliki ciri; mempunyai kepercayaan atas dirinya sendiri, mempunyai keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasibnya, mempunyai watak yang dinamis, bersedia dan mampu bekerja sama dengan pihak lain atas dasar pengertian dan penghormatan hak serta kewajiban masing-masing pihak, mempunyai watak yang bermoral tinggi, antara lain: jujur, menepati janji, dan peka hak dan kepentingan pihak lain. Konteks kualitas aparatur di era otonomi adalah kemampuan profesional dan keterampilan teknis para pegawai yang termasuk kepada unsur staf dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini sangat diperlukan agar manajemen pemerintahan dalam otonomi daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien (Koswara, 2001: 266).

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Jurnal dan Supomo (2002) pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009).

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Bellamy dan Tylor (1998), dan Heeks (2001) menyoroti bahwa informasi dan teknologi komputer telah memainkan peran yang semakin penting dalam administrasi publik. Istianingsih dan Wijanto (2009) memperoleh bukti bahwa penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi dapat mempengaruhi kepuasan pengguna laporan keuangan karena kualitas, kecepatan dan keakuratan data yang terdapat dalam laporan keuangan bersangkutan.

### **Pengawasan Keuangan Daerah**

Menurut Yosa (2010) pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk

membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut; pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan preventif, dan pengawasan represif (Arfianti, 2011).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).

Pengawasan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pengawasan intern pemerintah yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis pengujian hipotesis yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh institusi/lembaga yang meliputi kantor, dinas dan badan pada Kabupaten Aceh Tengah. Sebanyak 28 SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) dan untuk masing-masing SKPK terdiri dari 3 orang yang terdiri dari kepala SKPK atau Pengguna Anggaran, kepala bagian akuntansi dan staf bagian akuntansi sebagai responden penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil perolehan kuesioner dari responden penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan pengujian analisis regresi linier berganda yang merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data penelitian yaitu kuesioner yang telah diisi oleh responden dikuantitatifkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan keluaran-keluaran berupa

angka. Selanjutnya setelah data diperoleh, langkah berikutnya menganalisis dan menguji hipotesis yang dilakukan melalui program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*). Penelitian ini merupakan penelitian sensus, sehingga tidak dilakukan pengujian signifikansi. Rancangan pengujian hipotesis dilakukan dua tahap, yaitu rancangan pengujian hipotesis secara bersama-sama dan rancangan pengujian hipotesis secara terpisah. Persamaan model empiris yang digunakan dalam meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diketahui: Y (Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah), X<sub>1</sub> (Kualitas Aparatur Daerah), X<sub>2</sub> (Pemanfaatan Teknologi Informasi), X<sub>3</sub> (Pengawasan Keuangan Daerah), β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub> (Koefisien X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>), α (konstanta), ε (*error terms*).

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum Observasi Penelitian**

Studi ini dilakukan pada lingkungan SKPK Kabupaten Aceh Tengah yang berjumlah 28 SKPK. Unit analisis penelitian adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) atau Pengguna Anggaran (PA), kepala bagian akuntansi atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan staf bagian akuntansi atau Pembantu PPK yang berjumlah 84 orang. Kuesioner yang disebarakan berjumlah 84 kuesioner pada 28 SKPK, namun kuesioner yang kembali dan dapat diproses berjumlah 81 kuesioner dari 28 SKPK, artinya kuesioner kembali 96,42%.

**Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif dilakukan untuk setiap variabel penelitian yaitu kualitas aparatur daerah (X<sub>1</sub>), pemanfaatan teknologi informasi (X<sub>2</sub>), pengawasan keuangan daerah (X<sub>3</sub>), dan kualitas pelaporan keuangan daerah (Y), berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh responden. Statistik deskriptif berguna untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut disajikan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

	Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Kualitas Aparatur Daerah	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pengawasan Keuangan Daerah
N	28	28	28	28
Mean	4,37	4,42	4,43	4,46
Std. Deviation	0,26	0,20	0,26	0,24
Minimum	3,96	4,10	3,81	3,86
Maximum	4,88	4,93	4,95	4,86

Sumber: Data primer diolah (2017)

## Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

### 1. Hasil Uji Validitas

Dari hasil pengujian validitas data menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh dari masing-masing item variabel kualitas aparatur daerah ( $X_1$ ), pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ), pengawasan keuangan daerah ( $X_3$ ), dan kualitas pelaporan keuangan daerah ( $Y$ ), berada di atas nilai kritis korelasi *product moment* (koefisien korelasi  $> 0,374$ ) sehingga kuesioner yang digunakan dapat dinyatakan valid.

### 2. Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas diketahui nilai koefisien alpha untuk masing-masing variabel berada diatas 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang dijadikan alat ukur dalam penelitian ini layak untuk digunakan (*Reliable*).

## Hasil Pengujian Asumsi Klasik

### 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kualitas Aparatur Daerah	0,998	1,002
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,157	6,369
Pengawasan Keuangan Daerah	0,157	6,370

a. Dependent Variable: Kualitas Audit

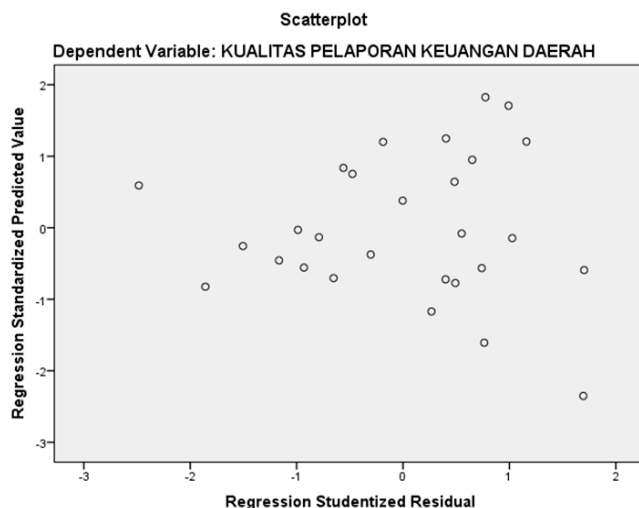
Sumber: Data Primer diolah (2017).

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 10 persen (0,157–0,998) yang berarti tidak ada korelasi antarvariabel bebas. Nilai VIF menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 (1,002-6,370). Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian ini tidak mengandung problem multikolinieritas.

### 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa tidak ada pola tertentu pada grafik, oleh karena itu data tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut.

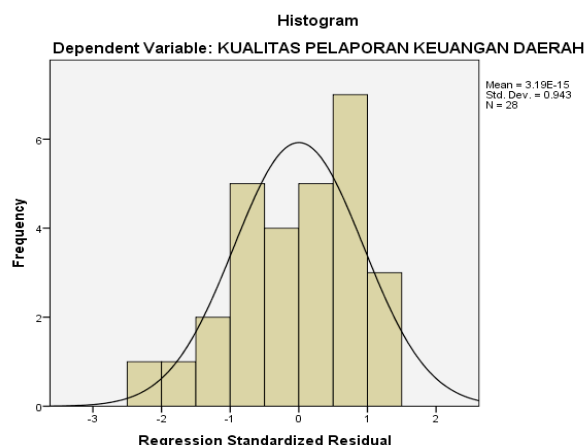




**Gambar 1**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

### 3. Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah grafik histogram, seperti terlihat pada Gambar 1. Berdasarkan hasil pengujian normalitas, data model regresi penelitian ini berdistribusi normal, hal tersebut dikarenakan distribusi normal membentuk satu garis lurus diagonal.



**Gambar 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

### Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian**

Persamaan Regresi $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$
$Y = 0,009 + 0,080 X_1 + 0,764 X_2 + 0,142 X_3 + \varepsilon$
R = 0,893
$R^2 = 0,797$

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Secara konseptual, proses penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah melibatkan banyak faktor, seperti regulasi di daerah (Qanun/Perda, Perkada, dan SOP), kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, kepemimpinan, pengawasan dan pengendalian, pemeriksaan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga prediktor (kualitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan), yang berarti belum memasukkan seluruh prediktor potensial untuk memprediksi variabel kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, keterbatasan ini dapat diperbaiki dalam riset berikutnya dengan menambahkan variabel-variabel lain (termasuk yang sudah disebutkan sebelumnya).

### **Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Adanya pengaruh kualitas aparatur daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah dalam hasil riset ini, mendukung temuan penelitian Wahyono (2004: 12) yang menyatakan bahwa dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai, dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan kapasitas sumber daya manusia yang dalam hal ini kemampuan sumber daya manusia tersebut untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai akan membantu menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dimana semua hal tersebut akan mendukung pemerintah daerah dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Darwanis dan Mahyani (2009), Megayanti, Adiputra, dan Sinarwati (2015), Primayana, Atmadja, dan Darmawan (2014), Angraeni dan Riduwan (2014), Setiawati dan Sari (2014), dan Husna (2013) yang memberikan bukti bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah ternyata menentukan kualitas pelaporan keuangan pada SKPD pemerintah daerah.

Perubahan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pelaporan keuangan pemerintah daerah ternyata mampu diantisipasi oleh pemerintah daerah terutama di pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kemampuan ini terjadi karena sumber daya manusia pada masing-masing SKPK telah siap untuk mendukung pengelolaan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Kebijakan Pemda Aceh Tengah selama ini untuk mendorong aparatur daerah melanjutkan studi sudah tepat karena bermanfaat dalam meningkatkan kualitas

SDM. Hal ini juga tergambar dari kualitas pelaporan keuangan Pemda Aceh Tengah yang sudah memperoleh opini WTP dari BPK selama 6 tahun berturut-turut.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Husein (2003) bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan menyebabkan peningkatan dalam hal pemrosesan transaksi menjadi lebih cepat dan keakurasian dalam perhitungan juga menjadi lebih besar. Darwanis dan Mahyani (2009) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasiaan yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang lebih andal karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material.

Jogiyanto (1995) menyatakan bahwa informasi yang berkualitas dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Menurut Jogiyanto (1995) informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Megayanti, Adiputra, dan Sinarwati (2015), Primayana, Atmadja, dan Darmawan (2014), Angraeni dan Riduwan (2014), Setiawati dan Sari (2014), Trisaputra (2013), dan Arfianti (2011) membuktikan bahwa dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Aceh Tengah telah berlangsung lama. Secara empiris, kontribusi teknologi informasi terhadap pencapaian opini WTP dari BPK selama 6 tahun berturut-turut tidak dapat dipungkiri. Artinya, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan di SKPK dan PPKD telah menghasilkan LKPD Kabupaten Aceh Tengah dengan kualitas terbaik.

### **Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Hasil penelitian ini sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No 51 Tahun 2010) pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Arfianti (2011) bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan nilai informasi pelaporan keuangan

pemerintah daerah. Primayana, Atmadja, dan Darmawan (2014) membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah yang baik akan berguna untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan atau tidak. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya pada pemerintah daerah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan pemerintahan. Entitas pengawasan, dalam hal ini adalah Inspektorat, juga melakukan review terhadap draft laporan keuangan Pemda sebelum diaudit oleh BPK.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Trisaputra (2013) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. Menurut Megayanti, Adiputra, dan Sinarwati (2015), Angraeni dan Riduwan (2014), Setiawati dan Sari (2014), Husna (2013), dan Arfianti (2011), dengan adanya pengawasan keuangan daerah, proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan akan lebih berkualitas.

Pelaksanaan fungsi pengawasan di Kabupaten Aceh Tengah oleh Inspektorat daerah dipandang menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian opini WTP dari BPK atas LKPD Kabupaten Aceh Tengah selama 6 tahun berturut-turut. Kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi yang dikombinasikan dengan kualitas pengawasan yang baik pada akhirnya menghasilkan pelaporan keuangan yang baik pula.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

## **REFERENSI**

Adhi, D. K. & Y. Suhardjo. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal STIE Semarang*. 5 (3), 93-111.

- Anggraeni, D. T. & A. Riduwan. (2014). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. 3 (3), 1-16.
- Arfianti, D. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Bellamy, C., & J. A. Taylor. (1998). *Governing in the Information Age*. Buckingham, UK: Open University Press.
- Darwanis & D. D. Mahyani.(2009). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterhandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. 2 (2).133-151.
- Eriva, C. Y., Islahuddin, & Darwanis. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja dan Jabatan terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(2), 1-14.
- Halim, A. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hamzah, A. (2009). Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura). *Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: UGM.
- Heeks, R. (2001). Understanding e-Governance for Development, Institute for Development Policy and Management. *Working Paper*. University of Manchester. Manchester: United Kingdom.
- Husna, F. (2013). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Indriasari, D., & E. Nahartyo. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Intern Sistem Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi*. VII. Pontianak.
- Jogiyanto.H, M. (1995). *Analisis dan Desain Sistem Informasi & Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Jurnali, T. & B. Supomo. (2002). Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. 5 (2), 214-228.
- Koswara, E. (2001). *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Pariba.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2 (1), 1-17.
- Martoyo, S. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 5, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.

- Megayanti, A. P., I M. P. Adiputra, & N. K. Sinarwati. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Jurusan Akuntansi Program. 3 (1), 1-12.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang *Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Primayana, K. H, A. T. Atmadja, & N. A. S. Darmawan. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*. 2 (1), 1-12.
- Salamun, S. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Sedarmayanti. (2004). *Pengembangan Kepribadian Pegawai*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawati, E. & S. P. Sari. (2014). Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi. *Syariah Paper*, 427-444. Diambil kembali dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4601?show=full>.
- Sugijanto. (2002). Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. *Lintasan Ekonomi*. XIX (1), 50-66.
- Trisaputra, A. (2013). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Artikel Ilmiah. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Wahyono, T. (2004). *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Andi.
- Wilkinson, W. J., M. J. Cerullo, V. Raval, & B. W. Wing. (2000). *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
- Yosa. 2010. *Pengertian Pengawasan*. Diambil kembali dari [www.itjen-depdagri.go.id](http://www.itjen-depdagri.go.id).